

SKRIPSI

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus SAMSAT Kabupaten Kepulauan Selayar)

NUR WACHIDA CINITYA LESTARI



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2016**

SKRIPSI

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus SAMSAT Kabupaten Kepulauan Selayar)

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**NUR WACHIDA CINITYA LESTARI
A31111260**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2016**

SKRIPSI

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus SAMSAT Kabupaten Kepulauan Selayar)

disusun dan diajukan oleh

NUR WACHIDA CINITYA LESTARI
A31111260

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 04 Februari 2016

Pembimbing I



Drs. Deng Siraja, Ak., M.Si., CA
NIP 195112281986031002

Pembimbing II



Drs. Muhammad Ashari, Ak., M.SA., CA
NIP 196502191994031002



Ketua Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP 196509251990022001

SKRIPSI

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus SAMSAT Kabupaten Kepulauan Selayar)

disusun dan diajukan oleh

NUR WACHIDA CINITYA LESTARI
A31111260

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **25 Februari 2016** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	TandaTangan
1.	Drs. Deng Siraja, Ak., M.Si., CA	Ketua	1.....
2.	Drs. Muhammad Ashari, Ak., M.SA., CA	Sekretaris	2.....
3.	Dr. Hj. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA	Anggota	3.....
4.	Drs. Yulianus Sampe, Ak., M.Si., CA	Anggota	4.....
5.	Drs. Syahrir, Ak., M.Si., CA	Anggota	5.....



Ketua Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. H. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIP. 19650925 199002 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : NUR WACHIDA CINITYA LESTARI

NIM : A31111260

jurusan/program studi : AKUNTANSI

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

**FAKTOR – FAKTOR YANG MEMENGARUHI
KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Kasus SAMSAT Kabupaten Kepulauan Selayar)**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 04 Februari 2016

Yang membuat pernyataan,



Nur Wachida Cinitya Lestari

PRAKATA

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Allahumma Shalli Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad.

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Samsat Kabupaten Kepulauan Selayar)”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Selama proses penyusunan skripsi ini peneliti mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada.

1. Kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi, Ibu Dra. Hj. Arifatun Munawaroh dan Ayah Kolonel CHB H. Nur Salam, yang selalu menjadi inspirasi, penyemangat, serta doa yang tak pernah putus. Terima kasih telah memberikan segala yang terbaik untuk saya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gagaring Pagalung, SE, M.Si., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
3. Ibu Dr. Hj. Mediaty, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Drs. Deng Siraja, Ak., M.Si, CA dan Bapak Drs. Muhammad Ashari, Ak., M.SA., CA selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memperbaiki, dan mendiskusikan kekurangan yang ada dalam skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Tim penguji peneliti, Ibu Dr. Hj. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA, Bapak Drs. Yulianus Sampe, Ak., M.Si., CA, dan Bapak Drs. Syahrir, Ak., M.Si., CA yang telah meluangkan waktu untuk memperbaiki, dan mendiskusikan kekurangan yang ada dalam skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Drs. M. Christian Mangiwa, Ak., M.Si., CA selaku Penasihat Akademik atas bimbingan dan arahan selama peneliti kuliah.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas perhatian, ilmu pengetahuan, dan bantuan yang telah diberikan selama ini.
8. Staf akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin khususnya jurusan akuntansi atas bantuan yang telah diberikan selama ini.
9. Pimpinan dan seluruh staf Kantor UPTD SAMSAT Kabupaten Kepulauan Selayar, yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian dan memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Kedua adikku, Nur Azizah Nafa Apriliandani dan Nur Zahra Vira Diva Mallarangan yang selalu memberikan semangat setiap saat.
11. Sahabat - sahabat terbaikku. Caca Hilal, Fahrian, Banni, Nia, Niken, Tenrigau. Terima kasih atas doa dan dukungan yang tak pernah putus.
12. Teman - teman Semua Senang. Atthariq, Cici Fildzah, Noni, Arini, Pahlevi, Omar, Fian, Agung, Suci, Reza, Medina, Fauzan, Asti, Hardi, Iqra, Tyara, Fadhil, A. Firdaus, Utami, Qisthi, Fadhilah, Irham yang selalu memberikan semangat dan dukungan.

13. Teman – teman seperjuangan I11inois. Inge, Brilyan, Melissa, Dian, Jerry, Pute, Ayu, Nunu, dan semua yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.
14. Teman – teman KKN Cakkela87. Ainun, Anty, Achmad Ritauddin, Hamri, Kaisar.
15. Para responden yang telah sangat membantu atas terselesaikannya skripsi ini, terima kasih.
16. Seluruh rekan yang turut serta dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari adanya kekurangan maupun kesalahan dalam skripsi ini, oleh karena itu kritik dan saran sangat peneliti harapkan dari semua pihak. Harapan peneliti semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca serta masyarakat pada umumnya.

Makassar, 04 Februari 2016

Peneliti

ABSTRAK

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus SAMSAT Kabupaten Kepulauan Selayar)

FACTORS THAT AFFECT THE TAXPAYER COMPLIANCE IN PAYING THE TAX OF MOTOR VEHICLE (Case Study SAMSAT of Selayar Regency)

Nur Wachida Cinitya Lestari
Deng Siraja
Muhammad Ashari

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat di Kabupaten Kepulauan Selayar. Variabel independen pada penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, serta sanksi perpajakan. Sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak pada Kantor Samsat Kabupaten Kepulauan Selayar. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode survey dengan memberikan sejumlah kuesioner kepada wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Samsat Kabupaten Kepulauan Selayar. Penentuan sampel dilakukan dengan metode *simple random sampling* dan selanjutnya data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan regresi linear berganda. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 99 responden dari keseluruhan populasi. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, serta sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Kantor Samsat Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kata Kunci: kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak

This study aims to analyze factors that affect the taxpayer compliance in paying the tax of motor vehicle in Samsat Office of Selayar Regency . Independent variables of this study are taxpayers awareness, quality of tax services, and tax penalties, while the dependent variable is taxpayer compliance in Samsat Office of Selayar Regency. This study uses survey method by administering some questionnaires to the registered taxpayers in Samsat Office of Selayar Regency. The samples are defined by using simple random sampling method and the collected data are analyzed by multiple linear regression. This study used 99 taxpayers as respondents from the total population. The result of the regression test shows that taxpayer awareness, quality of tax service, and tax penalties have impact to taxpayer compliance in Samsat Office of Selayar Regency.

Keywords: *taxpayers awareness, quality of tax services, tax penalties, taxpayer compliance*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	6
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Teori Atribusi.....	8
2.2 Pajak.....	9
2.2.1 Definisi Pajak.....	9
2.2.2 Fungsi Pajak.....	10
2.2.3 Syarat Pemungutan Pajak	10
2.2.4 Teori – Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak	11
2.2.5 Pengelompokan Pajak.....	12
2.2.6 Pajak Daerah.....	13
2.2.7 Jenis Pajak dan Objek Pajak	13
2.2.8 Pajak Kendaraan Bermotor.....	14
2.3 Kepatuhan Wajib Pajak.....	16
2.4 Kesadaran Wajib Pajak.....	16
2.5 Kualitas Pelayanan Perpajakan	17
2.6 Sanksi Perpajakan	18
2.7 Penelitian Terdahulu	20
2.8 <i>Kerangka Pemikiran Teoritis</i>	21
2.9 Pengembangan Hipotesis	22

BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1 Rancangan Penelitian.....	25
3.2 Tempat dan Waktu.....	25
3.3 Populasi dan Sampel	25
3.4 Jenis dan Sumber Data	26
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	28
3.7 Instrumen Penelitian	30
3.8 Analisis Data.....	30
3.8.1 Uji Kualitas Data	31
3.8.2 Asumsi Klasik.....	32
3.8.3 Pengujian Hipotesis	33
BAB IV HASIL PENELITIAN	34
4.1 Karakteristik Responden.....	34
4.2 Penentuan Range.....	36
4.3 Analisis Deskriptif dan Perhitungan Skor Variabel X dan Y	37
4.4 Analisis Deskriptif dan Perhitungan Skor Variabel X	38
4.4.1 Analisis Deskriptif Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1).....	38
4.4.2 Analisis Deskriptif Variabel Kualitas Pelayanan Pajak (X2)	40
4.4.3 Analisis Deskriptif Variabel Sanksi Perpajakan (X3).....	43
4.5 Analisis Deskriptif dan Perhitungan Skor Variabel Y	46
4.6 Uji Kualitas Data	49
4.6.1 Uji Validitas	49
4.6.2 Uji Reliabilitas	51
4.7 Uji Asumsi Klasik	52
4.7.1 Uji Multikolinearitas	52
4.7.2 Uji Heteroskedastisitas.....	52
4.7.1 Uji Normalitas.....	53
4.8 Analisis Regresi Linier Berganda	55
4.9 Pengujian Hipotesis	56
4.9.1 Uji F	56
4.9.2 Uji t.....	57
BAB V KESIMPULAN	61
5.1 Kesimpulan	61
5.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Samsat Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010-2014	2
Tabel 1.2 Jumlah Kendaraan Bermotor yang Membayar Pajak	3
Tabel 2.1 Pajak Kendaraan Bermotor	15
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	21
Tabel 3.1 Definisi Operasional	29
Tabel 4.1 Persentase Usia Responden	34
Tabel 4.2 Persentase Jenis Kelamin	35
Tabel 4.3 Persentase Pekerjaan Responden	36
Tabel 4.4 Tanggapan Responden Mengenai Kesadaran Wajib Pajak	38
Tabel 4.5 Tanggapan Responden Mengenai Kualitas Pelayanan	41
Tabel 4.6 Tanggapan Responden Mengenai Sanksi Perpajakan	44
Tabel 4.7 Tanggapan Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak	47
Tabel 4.8 Uji Validitas	50
Tabel 4.9 Uji Reliabilitas	51
Tabel 4.10 Uji Multikolinearitas	52
Tabel 4.11 Hasil Uji Regresi Linier Berganda	55
Tabel 4.12 Hasil Uji F	56
Tabel 4.13 Hasil Uji t	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis.....	22
Gambar 4.1 <i>Scatterplot</i>	53
Gambar 4.2 <i>Normal Probability Plot of Regression</i>	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Biodata	67
Lampiran 2 Kuesioner Penelitian.....	68
Lampiran 3 Daftar Responden Penelitian	71
Lampiran 4 Hasil Data Olahan SPSS	74
Lampiran 5 Tabulasi Data	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki dua sumber pendapatan negara. Salah satunya yang menjadi sumber penerimaan yang cukup besar dan juga sumber dana yang penting bagi pembangunan nasional adalah pajak. Pajak merupakan bagian yang cukup potensial sebagai penerimaan negara maupun daerah. Pajak yang dikelola pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan negara di dalam APBN, sedangkan pajak yang dikelola pemerintah daerah merupakan sumber penerimaan daerah di dalam APBD.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai. Setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Salah satu sumber penerimaan daerah adalah pendapatan asli daerah, di mana salah satu komponennya yaitu pemungutan pajak daerah.

Besar kecilnya penerimaan pajak suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Semakin baik pertumbuhan ekonominya, maka pendapatan masyarakat juga meningkat. Hal ini tentu berpengaruh pada kemampuan masyarakat untuk membayar pajak. Namun ini tidak akan terwujud apabila tingkat kepatuhan wajib pajak masih sangat rendah.

Sehingga kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sangat diharapkan agar semakin banyak pajak yang diterima dan tentunya akan semakin menguntungkan bagi daerah tersebut.

Pajak kendaraan bermotor yang merupakan salah satu komponen pajak daerah memiliki kontribusi yang tinggi dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Menurut Putri (2012), pembangunan daerah tiap kabupaten / kota salah satunya dibiayai melalui dana yang didapat melalui pajak kendaraan bermotor. Maka pemungutan penerimaan pajak ini perlu dioptimalkan sebaik mungkin. Tingginya jumlah penggunaan kendaraan bermotor dapat dilihat dari semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor yang ada.

Di Kabupaten Selayar sendiri, sampai dengan tahun 2014, jumlah kendaraan roda dua sebanyak 11.428 unit dan kendaraan roda empat sebanyak 816 unit. Semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor maka Wajib Pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor juga semakin meningkat. Berikut merupakan data jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2010-2014.

Tabel 1.1 Jumlah Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Samsat Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2010-2014

Tahun	R2	%	R3	%	R4 ≥	%	Jumlah
2010	5.596	90,73	28	0,45	554	8,82	6.168
2011	6.836	91,55	33	0,44	598	8,01	7.467
2012	8.472	92,38	49	0,53	650	7,09	9.171
2013	9.669	92,3	86	0,82	721	6,88	10.476
2014	11.428	92.47	114	0,92	816	6,6	12.358

Sumber: Samsat Kab. Kep. Selayar (2015)

Dapat dilihat dari tabel 1.1 di atas bahwa ada peningkatan jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun. Namun peningkatan ini tidak dibarengi dengan jumlah masyarakat yang membayar pajak kendaraan bermotornya. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.2 Jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak

Tahun	Jumlah kendaraan	Jumlah Kendaraan yang membayar pajak	Selisih	%
2010	6.168	4.667	1.501	75,66
2011	7.467	5.471	1.996	73,26
2012	9.171	6.465	2.706	70,49
2013	10.476	6.818	3.658	65,08
2014	12.358	8.023	4.335	64,9

Sumber: Samsat Kabupaten Kep. Selayar (2015)

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa ada selisih antara jumlah kendaraan yang terdaftar dengan jumlah kendaraan yang membayar pajak kendaraan bermotor. Selain itu, persentase jumlah kendaraan yang membayar pajak kendaraan bermotor turun setiap tahunnya. Tentunya banyak hal yang dapat memengaruhi hal tersebut. Salah satu hal yang memengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai warga Negara yang baik adalah kepatuhan dalam membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya.

Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Yang pertama adalah kesadaran wajib pajak. *Self assessment system* yang kini dianut Indonesia dalam hal pemungutan pajak memberikan kebebasan dan tanggung jawab yang besar kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini akan terwujud apabila adanya kesadaran Wajib Pajak (*tax consciousness*) dalam diri Wajib Pajak itu sendiri. Jika ada kesadaran dari wajib

pajak maka sikap patuh, taat, dan disiplin akan muncul. Penelitian Marjan (2014) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan formal wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Putri (2012) bahwa kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Faktor kedua yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kualitas pelayanan. Pelayanan prima dari petugas terkait yang meliputi bantuan yang diberikan petugas dalam pengisian, penyetoran, dan pelaporan pajak sehingga wajib pajak paham dan mengerti akan kewajiban pajaknya serta kemudahan dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian yang dilakukan Utomo (2011) menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan menjadi faktor ketiga yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi (Mardiasmo, 2011:59). Penelitian yang dilakukan Putri (2012) menunjukkan bahwa secara parsial sanksi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Putri (2012). Putri melakukan penelitian mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Denpasar. Variabel bebas yang digunakan ada empat yaitu kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh WP kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Denpasar sampai dengan periode 31 Desember 2011. Berdasarkan kriteria tersebut

diperoleh jumlah populasi sebesar 940.472 dengan jumlah sampel sebesar 100 responden yang diperoleh melalui *incidental sampling*, yang kebetulan ditemui peneliti yang berada di Kantor SAMSAT Denpasar. Responden diminta untuk mengisi sejumlah pertanyaan dalam kuesioner yang dibuat dan diberikan langsung oleh peneliti.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan tiga variabel bebas yaitu kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan. Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang tercatat di Kantor SAMSAT Kabupaten Kepulauan Selayar. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *simple random sampling* dimana pengambilan sampel dilakukan secara acak.

Berdasarkan latar belakang telah dipaparkan di atas, penelitian ini berjudul, **“Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus SAMSAT Kabupaten Kepulauan Selayar)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi pedoman dan referensi untuk penelitian selanjutnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini, pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan perpajakan khususnya kepatuhan wajib pajak dapat bertambah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi tambahan dan referensi dalam usaha peningkatan kepatuhan perpajakan terutama dalam kaitannya dengan kesadaran, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan khususnya di wilayah penelitian.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab satu adalah bab pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua adalah bab tinjauan pustaka. Dalam bab ini terdapat landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis yang diperlukan dalam menunjang penelitian ini.

Bab tiga adalah bab metode penelitian. Dalam bab ini meliputi rancangan penelitian, tempat penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian, dan analisis data.

Bab empat adalah bab hasil penelitian. Pada bab ini akan diuraikan tentang analisis deskriptif dan perhitungan skor variabel x dan y , uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis.

Bab lima adalah bab penutup. Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Teori ini dikembangkan oleh Fritz Heider (Suartana, 2010:181) yang menyatakan “bahwa perilaku seseorang itu ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (*internal forces*), yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang... dan kekuatan eksternal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar....”

Robbins (2008:177) menyimpulkan sebagai berikut.

“Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini dipengaruhi oleh kendali pribadi seorang individu. Perilaku yang disebabkan secara eksternal dianggap sebagai akibat-akibat dari sebab luar; yaitu, individu tersebut dianggap telah dipaksa berperilaku demikian oleh situasi”.

Pada dasarnya teori ini mengemukakan bahwa ketika mengobservasi perilaku seorang individu, kita berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal. Namun sebagian besar penentuan tersebut bergantung pada tiga faktor: (1) kekhususan, (2) konsensus, (3) konsistensi.

Kekhususan merujuk pada apakah seorang individu memperlihatkan perilaku-perilaku berbeda dalam situasi-situasi yang berbeda. Bila semua individu yang menghadapi situasi yang serupa merespon dalam cara yang sama, bisa dikatakan bahwa perilaku tersebut menunjukkan konsensus. Sedangkan konsistensi dapat diamati dari tindakan-tindakan seseorang dalam merespon kejadian yang sama. Semakin konsisten perilaku individu tersebut, semakin besar kecenderungan pengamat untuk menghubungkannya dengan sebab-sebab internal.

Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi seseorang untuk membayar pajak, baik secara internal maupun eksternal. Perilaku yang dapat memengaruhi secara internal adalah perilaku yang diyakini dipengaruhi oleh

kendali pribadi seorang individu. Perilaku yang disebabkan secara eksternal dianggap sebagai akibat dari sebab-sebab luar; dimana individu tersebut dianggap telah dipaksa berperilaku demikian oleh situasi.

2.2 Pajak

2.2.1 Definisi Pajak

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH mengatakan bahwa:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (Mardiasmo, 2011:1).

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani :

“Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan” (Darwin, 2010:15).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang bersifat memaksa bagi wajib pajak berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku dimana wajib pajak tidak menerima imbalannya secara langsung dan digunakan untuk membiayai keperluan negara yang bermanfaat bagi masyarakat.

2.2.2 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak (Mardiasmo, 2011:1-2), yaitu:

1. pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, atau biasa disebut fungsi budgetair.
2. pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, atau disebut fungsi mengatur (*regulerend*).

2.2.3 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:2) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut.

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan).

Sesuai dengan tujuan hukum yaitu mencapai keadilan, maka undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis).

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis).

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak mengakibatkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial).

Biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari pemungutannya agar sesuai dengan fungsi budgetair.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru, karena sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

2.2.4 Teori-Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011:3-4) menyatakan bahwa terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada Negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

1. Teori Asuransi.

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan.

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pula pajak yang harus dibayar.

3. Teori Gaya Pikul.

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:

- a. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- b. Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

4. Teori Bakti.
Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.
5. Teori Azas Gaya Beli.
Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan masyarakat lebih diutamakan.

2.2.5 Pengelompokan Pajak

Pajak dapat dikelompokkan menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya (Mardiasmo, 2011:5-6).

1. Menurut golongannya.
 - a. Pajak langsung. Dimana seluruh beban pajak dipikul oleh wajib pajak dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
 - b. Pajak tidak langsung. Merupakan jenis pajak dimana beban pajaknya dapat dipindahtanganan ke orang lain, baik seluruh maupun sebagian beban pajak tersebut.
2. Menurut sifatnya.
 - a. Pajak Subjektif. Pajak yang memperhatikan keadaan subjek pajak, yaitu Wajib Pajak.
 - b. Pajak Objektif. Pajak yang berdasarkan objek pajaknya tanpa memperhatikan keadaan Wajib Pajak.
3. Menurut lembaga pemungutnya.
 - a. Pajak Pusat. Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
 - b. Pajak Daerah. Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.2.6 Pajak Daerah

Zuraida (2012:31) menjelaskan bahwa sesuai UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 10 tentang PDRD, dijelaskan pengertian Pajak Daerah, yaitu:

“Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Karakteristik Pajak Daerah adalah sebagai berikut (Zuraida 2012:31-32).

- a. Dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan.
- b. Pemungutan tersebut dilakukan dalam hal terdapat keadaan atau peristiwa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan Pajak Daerah.
- c. Dapat dipaksakan pemungutannya, apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah dapat dikenakan sanksi administrasi maupun pidana.
- d. Tidak terdapat hubungan langsung atas pembayaran pajak daerah dengan imbalan atau jasa secara langsung.
- e. Hasil penerimaan pajak daerah disetor ke kas daerah.
- f. Digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2.7 Jenis Pajak dan Objek Pajak

Mardiasmo (2011:13) Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sebagai berikut.

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan;
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.2.8 Pajak Kendaraan Bermotor

Objek Pajak Kendaraan Bermotor (Zuraida, 2011:33) adalah “Kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.”

Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah sebagai berikut.

- a. Kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).
- b. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang ada dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/ atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.

Tabel 2.1 Pajak Kendaraan Bermotor

Unsur	Keterangan
Objek Pajak	Kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 sampei dengan GT 7, kecuali: <ul style="list-style-type: none"> a. kereta api; b. kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara; c. kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan d. objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
Subjek Pajak	Orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
Tarif	<ul style="list-style-type: none"> a. kepemilikan I: 1%-2%; b. kepemilikan II dan seterusnya dapat diterapkan tarif progresif: 2%-10%; c. angkutan umum/pemerintah/ambulans dan lain-lain: 0,5%-1%; d. alat berat/besar: 0,2%-0,1%.
Dasar Pengenaan	Nilai Jual Kendaraan Bermotor dikali bobot kerusakan jalan.
Earmarking	Minimal 10% digunakan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

Sumber: Zuraida (2011:39)

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

“*Tax Compliance* atau kepatuhan pajak diartikan sebagai kondisi ideal wajib pajak yang memenuhi peraturan perpajakan serta melaporkan penghasilannya secara akurat dan jujur. Dari kondisi ideal tersebut, kepatuhan pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan wajib pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya dalam bentuk formal dan kepatuhan material” (Harinurdin, 2009:97).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2012 seorang wajib pajak dikatakan patuh apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.4 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti, dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor–faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati. Bila seseorang hanya mengetahui berarti kesadaran wajib pajak tersebut masih rendah.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.

Indikasi tingginya tingkat kesadaran dan kepedulian Wajib Pajak antara lain:

- 1) realisasi penerimaan pajak terpenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

- 2) tingginya tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dan SPT Masa.
- 3) tingginya *Tax Ratio*.
- 4) semakin bertambahnya jumlah Wajib Pajak baru.
- 5) rendahnya jumlah tunggakan/tagihan wajib pajak.
- 6) tertib, patuh, dan disiplin membayar pajak atau minimnya jumlah pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan.

2.5 Kualitas Pelayanan Perpajakan

Kualitas atau biasa yang disebut dengan mutu merupakan taraf, derajat, atau tingkat baik maupun buruknya sesuatu. Sedangkan pengertian pelayanan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah menolong menyediakan segala apa yang diperlukan orang lain seperti tamu atau pembeli.

Hakekat pelayanan publik yang dijelaskan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 bahwa pada dasarnya hakekat pelayanan publik merupakan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, prinsip pelayanan publik adalah sebagai berikut.

1. Kesederhanaan
Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
2. Kejelasan
 - a. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik;
 - b. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persolan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik;
 - c. Rincian biaya pelayanan public dan tata cara pembayaran.
3. Kepastian Waktu

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

4. Akurasi
Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah.
5. Keamanan
Proses dan pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
6. Tanggung Jawab
Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
7. Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).
8. Kemudahan Akses
Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.
9. Kedisiplinan, Kesopanan, dan Keramahan
Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
10. Kenyamanan
Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.

2.6 Sanksi Perpajakan

Mardiasmo (2011:59-60) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah sebagai berikut.

1. Sanksi Administrasi

Merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya bunga dan kenaikan.

2. Sanksi Pidana

Merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Ada 3 macam sanksi pidana, yaitu sebagai berikut.

a. Denda Pidana

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada Wajib Pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

b. Pidana kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian.

c. Pidana Penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, namun hanya kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian tersebut digunakan untuk membantu pihak-pihak terkait sebagai upaya peningkatan kinerja. Di bawah ini merupakan tabel yang menunjukkan hasil penelitian terdahulu tentang kepatuhan wajib pajak.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

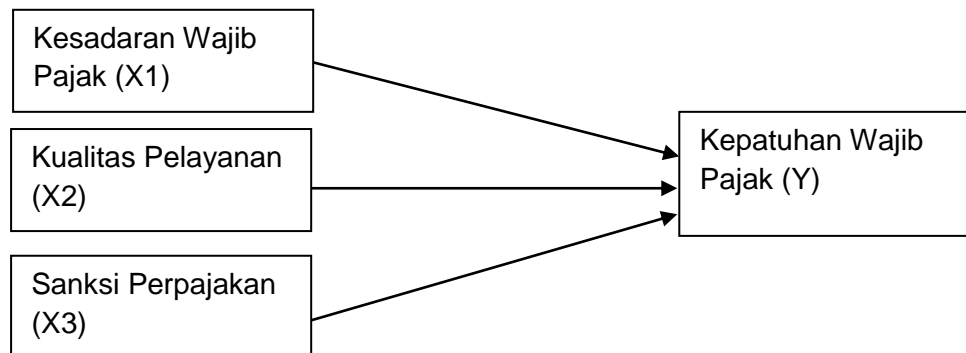
No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Amanda R. Siswanto Putri dan I Ketut Jati, 2012	Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Denpasar	1. Kepatuhan (Y)	Kesadaran Wajib Pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
			2. Kesadaran Wajib Pajak (X1)	
			3. Kewajiban Moral (X2)	
			4. Kualitas Pelayanan Pajak (X3)	
			5. Sanksi Perpajakan (X4)	
2.	Musniati, 2014	Pengaruh denda, kesadaran Wajib Pajak, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Makassar Selatan	1. Sanksi Denda (X1)	Denda, kesadaran Wajib Pajak, dan kualitas pelayanan fiskus secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan
			2. Kesadaran Wajib Pajak (X2)	
			3. Kualitas pelayanan fiskus (X3)	
			4. Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)	
3.	Sri Putri Tita Mutia, 2014	Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	1. Sanksi perpajakan (X1)	Sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pribadi
			2. Kesadaran perpajakan (X2)	
			3. Pelayanan fiskus (X3)	
			4. Tingkat pemahaman (X4)	
			5. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	

2.8 Kerangka Pemikiran Teoritis

Penelitian ini berusaha menjelaskan faktor-faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan merupakan faktor-faktor yang diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan

Wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Gambar akan menyajikan kerangka pemikiran teoritis penelitian ini.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis



2.9 Pengembangan Hipotesis

2.9.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Teori atribusi yang dikembangkan oleh Fritz Heider yang mengargumentasikan bahwa perilaku seseorang itu ditentukan oleh kekuatan internal (*internal forces*), yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang.

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tentunya berasal dari dalam diri individu itu sendiri, karena kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Sehingga hal ini dianggap berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Marjan dengan judul “Pengaruh kesadaran Wajib Pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak” menunjukkan bahwa adanya pengaruh

kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.9.2 Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hadipranata (1980) berpendapat bahwa, pelayanan adalah aktivitas tambahan di luar tugas pokok (*job description*) yang diberikan kepada konsumen-pelanggan, nasabah, dan sebagainya-serta dirasakan baik sebagai penghargaan maupun penghormatan.

Kualitas pelayanan akan berbanding lurus terhadap minat wajib pajak untuk datang ke Kantor SAMSAT untuk membayar pajak. Kualitas yang baik tidak dipungkiri dapat mendorong minat wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor mereka.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Putri (2012) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2 : Kualitas pelayanan pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.9.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Mardiasmo (2009:59-60) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi.

Sanksi perpajakan dianggap akan menambah masalah atau mempersulit wajib pajak itu sendiri dalam membayar pajak. Untuk menghindari sanksi

perpajakan baik secara administratif maupun pidana, wajib pajak akan cenderung untuk taat dan patuh melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik.

Penelitian yang dilakukan Mutia pada tahun 2014 sejalan dengan penelitian yang dilakukan Marjan (2014) bahwa sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3 : Sanksi perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif (*Causal Comparative Research*). Indriantoro dan Supomo (2013) menjelaskan bahwa penelitian kausal komparatif merupakan tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih. Peneliti melakukan pengamatan terhadap konsekuensi-konsekuensi yang timbul dan menelusuri kembali fakta yang secara masuk akal sebagai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor SAMSAT Kabupaten Kepulauan Selayar di Jalan Sismomiharjo, Benteng, Selayar. Penelitian ini berlangsung pada tahun 2015.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak yang kendaraannya terdaftar di SAMSAT Kabupaten Kepulauan Selayar. Jumlah kendaraan yang terdaftar sebanyak 13.153 unit kendaraan. Peneliti meneliti sebagian dari elemen-elemen populasi atau yang biasa disebut sampel. Metode yang digunakan dalam penentuan sampel adalah metode *simple random*

sampling atau sampel acak sederhana. Dimana dalam penelitian ini, sampelnya merupakan orang-orang yang ditemui peneliti secara acak di lokasi penelitian.

Untuk menentukan ukuran sampel digunakan rumus *Slovin* (Umar, 2002), yaitu sebagai berikut.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{13.153}{1 + 13.153 \cdot 0,1^2} = \frac{13.153}{132,53} = 99,245$$

Dibulatkan menjadi 99 sampel.

Keterangan:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, dalam penelitian ini adalah 0,1.

Berdasarkan perhitungan di atas, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 99 Wajib Pajak.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari wajib pajak yang kendaraannya terdaftar pada SAMSAT Kabupaten Kepulauan Selayar. Sedangkan data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (dokumenter) baik yang dipublikasikan maupun tidak. Data sekunder dalam penelitian ini berupa penelitian terdahulu, jurnal-jurnal, dan mengakses website.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data, yaitu sebagai berikut.

1. Data primer dikumpulkan dengan metode *survey* menggunakan media angket (kuesioner). Sejumlah pertanyaan akan diajukan oleh peneliti dan kemudian responden diminta menjawab sesuai dengan pendapat mereka. Untuk mengukur pendapat responden, digunakan skala likert atau biasa dikenal dengan *summated ratings* yang pada umumnya menggunakan lima angka penilaian (Indriantoro dan Supomo, 2013:104) yaitu:
 - a. Kategori Sangat Setuju (SS) diberi skor 5
 - b. Kategori Setuju diberi (S) skor 4
 - c. Kategori Netral (N) diberi skor 3
 - d. Kategori Tidak Setuju (TS) diberi skor 2
 - e. Kategori Sangat Tidak setuju (STS) diberi skor 1
2. Data sekunder (Hamdi dan Bahrudin, 2014) yaitu data yang diperoleh dari lembaga yang berpengaruh dengan penelitian, buku pustaka, dan sebagainya seperti berikut.
 - a. Studi Kepustakaan (*Library Study*)

Penulis berusaha mengumpulkan informasi mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yaitu dengan membaca literatur atau buku yang ada di perpustakaan.
 - b. Pengambilan data dari luar tempat penelitian secara langsung seperti pengambilan data dari lembaga sekitar tempat penelitian.
 - c. Data-data dari kabupaten, kecamatan, dan dinas setempat yang mendukung penelitian.

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Penelitian ini terdiri dari satu variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak sedangkan variabel bebas dalam penelitian ini yaitu kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan. Definisi operasional dari masing-masing variabel akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Kepatuhan wajib pajak (Y)

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan wajib pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya dalam bentuk formal dan kepatuhan material (Harinurdin, 2009:97).

2. Kesadaran wajib pajak (X1)

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.

3. Kualitas pelayanan pajak (X2)

Kualitas pelayanan pajak merupakan tingkat baik maupun buruknya layanan pajak dimana kualitas pelayanan yang baik dapat terwujud jika petugas pajak terkait melakukan tugasnya secara profesional, disiplin, dan transparan, serta wajib pajak merasa puas dengan pelayanan yang diberikan.

4. Sanksi perpajakan (X3)

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011:59-60).

Tabel 3.1 Definisi Operasional

Variabel	Notasi	Indikator Pertanyaan	Skala	Sumber
Kepatuhan Wajib Pajak (Patuh)	Patuh 1	Secara umum dapat dikatakan bahwa saya paham Undang-Undang Perpajakan	5 poin skala likert, 1 untuk STS hingga 5 untuk SS	Marjan (2014)
	Patuh 2	Saya selalu mengisi formulir pajak dengan benar		
	Patuh 3	Saya selalu menghitung pajak dengan jumlah yang benar		
	Patuh 4	Saya selalu membayar pajak tepat pada waktunya		
Kesadaran Wajib Pajak	Sadar 1	Pajak merupakan iuran rakyat yang digunakan untuk pembangunan	5 poin skala likert, 1 untuk STS hingga 5 untuk SS	Marjan (2014)
	Sadar 2	Pajak merupakan iuran rakyat yang digunakan untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi pemerintahan		
	Sadar 3	Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang paling besar		
	Sadar 4	Saya harus membayar pajak karena pajak merupakan kewajiban kita sebagai warga Negara		
Kualitas Pelayanan	Kualitas 1	Petugas pajak telah memberikan pelayanan pajak dengan baik	5 poin skala likert, 1 untuk STS hingga 5 untuk SS	Marjan (2014)
	Kualitas 2	Saya merasa bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh petugas pajak dapat membantu pemahaman mengenai hak dan kewajiban saya selaku Wajib Pajak		
	Kualitas 3	Petugas pajak selalu memperhatikan keberatan Wajib Pajak atas pajak yang dikenakan		
	Kualitas 4	Cara membayar pajak adalah mudah/ efisien		

Lanjutan Tabel 3.1

Variabel	Notasi	Indikator Pertanyaan	Skala	Sumber
Sanksi Perpajakan	Sanksi 1	Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan	5 poin skala likert, 1 untuk STS hingga 5 untuk SS	Marjan (2014)
	Sanksi 2	Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran		
	Sanksi 3	Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan		
	Sanksi 4	Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku		

3.7 Instrumen Penelitian

(Sugiyono, 2013) menyatakan “Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Instrumen penelitian akan digunakan untuk melakukan pengukuran dengan tujuan menghasilkan data kuantitatif yang akurat”. Pada penelitian ini, instrumen penelitian yang digunakan berupa kuesioner dimana pertanyaan yang diajukan dijawab oleh responden lalu kemudian data tersebut diolah.

3.8 Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Tujuan analisis regresi berganda adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

Penelitian ini menggunakan tiga variabel bebas sehingga persamaannya adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \dots + e$$

keterangan:

Y	= Kepatuhan Wajib Pajak
a	= Konstanta
b_1, b_2, b_3	= Koefisien regresi
X_1	= Kesadaran Wajib Pajak
X_2	= Kualitas Pelayanan
X_3	= Sanksi Perpajakan
e	= <i>Error</i>

3.8.1 Uji Kualitas Data

Suntoyo (2013:84-85) menjelaskan tentang validitas dan reliabilitas, yaitu:

1. Validitas

Untuk mengukur sah atau valid maupun tidaknya suatu kuesioner maka digunakan uji validitas. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Mengukur tingkat validitas dapat dilakukan dengan melakukan korelasi antara skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk.

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan kriteria yang digunakan untuk menyatakan suatu instrumen dianggap valid atau layak digunakan dalam pengujian hipotesis apabila *Corrected Item-Total Correlation* lebih besar dari 0,05.

2. Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Butir pertanyaan dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten.

Dalam penelitian ini digunakan fasilitas *Cronbach Alpha* yang terdapat dalam bantuan komputer SPSS. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* $> 0,60$.

3.8.2 Asumsi Klasik

Terdapat 3 jenis uji asumsi klasik (Suntoyo, 2013:89-92) sebagai berikut.

1. Multikolinearitas

Uji asumsi klasik jenis ini diterapkan untuk analisis regresi berganda yang terdiri atas dua atau lebih variabel bebas dimana akan diukur keeratan hubungan antarvariabel bebas tersebut melalui besaran koefisien korelasi (r). Dikatakan terjadi multikolinieritas, jika koefisien korelasi antar variabel bebas lebih besar dari 0,60. Dikatakan tidak terjadi multikolinieritas jika koefisien korelasi antar variabel bebas lebih kecil atau sama dengan 0,60 ($r \leq 0,60$).

2. Heteroskedastisitas

Selain uji asumsi klasik multikolinearitas, dalam persamaan regresi berganda perlu juga diuji mengenai sama atau tidak varian dari residual dari observasi yang satu dengan yang lainnya. Dikatakan Homoskedastisitas jika residualnya memiliki varian yang sama. Namun, jika variansnya berbeda maka disebut terjadi heteroskedastisitas.

3. Normalitas

Uji normalitas merupakan uji asumsi klasik lainnya selain uji asumsi klasik multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Uji normalitas di mana akan menguji data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan.

3.9 Pengujian Hipotesis

Menurut Ghozali (2006:84) uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Hipotesis Nol (H_0) yang akan diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol, atau:

$$H_0 : b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$$

Persamaan diatas menunjukkan apakah semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (H_a), tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol, atau:

$$H_a : b_1 \neq b_2 \neq \dots \neq b_k \neq 0$$

Persamaan diatas menunjukkan semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (b_i) sama dengan nol, atau:

$$H_0 : b_i = 0$$

Persamaan diatas menunjukkan apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (H_a), parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau:

$$H_a : b_i \neq 0$$

Persamaan diatas menunjukkan bahwa variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Karakteristik Responden

Responden pada penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar pada UPTD Samsat Kabupaten Kepulauan Selayar dengan jumlah responden sebanyak 99 responden. Keseluruhan 99 eksamplar kuesioner yang diberikan kepada responden telah diisi secara lengkap dan benar sehingga layak untuk dianalisis lebih lanjut untuk kepentingan penelitian ini.

Karakteristik responden dikelompokkan menurut usia, jenis kelamin, dan pekerjaan. Pengelompokan karakteristik responden akan dijelaskan pada tabel berikut.

1. Karakteristik responden berdasarkan usia

Tabel 4.1 Persentase Usia Responden

Usia	Frekuensi	Persentase (%)
≤ 20	4	4
21-30	25	25.26
31-40	40	40.4
41-50	24	24.24
>51	6	6.1
Total	99	100

Sumber: Data Primer yang diolah (2016)

Dari data karakteristik responden berdasarkan usia pada tabel 4.1 di atas, maka jumlah responden terbesar adalah responden yang berusia 31-40 tahun yaitu sebanyak 40 orang atau 40,4%. Sedangkan jumlah responden terendah

adalah responden yang berusia dibawah 18 tahun yaitu sebanyak 4 orang atau 4%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor di UPTD Samsat Selayar berusia antara 31 tahun sampai 40 tahun.

2. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

Tabel 4.2 Persentase Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki - Laki	68	68.5
Perempuan	31	31.5
Total	99	100

Sumber: Data Primer yang Diolah (2016)

Dari data karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin pada tabel 4.2 di atas, maka jumlah responden terbesar adalah responden yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 68 orang atau 68,5%. Sedangkan jumlah responden terendah adalah responden yang berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 31 orang atau 31,5%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Selayar adalah berjenis kelamin laki-laki.

3. Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan

Tabel 4.3 Persentase Pekerjaan Responden

Pekerjaan	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
Mahasiswa	5	5.1
Nelayan	3	3.1
Pegawai Negeri Sipil	35	35.3
Wiraswasta	30	30.1
Ibu Rumah Tangga	8	8.1
Pensiunan	2	2.1
Petani	10	10.1
Lain-lain	6	6.1
Total	99	100

Sumber: Data Primer yang Diolah (2016)

Dari data karakteristik responden berdasarkan pekerjaan pada tabel 4.3 di atas, maka jumlah responden terbesar adalah responden yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil yaitu sebanyak 35 orang atau 35,3%.

4.2 Penentuan Range

Jumlah pertanyaan dalam kuesioner penelitian ini yaitu masing-masing 4 pertanyaan pada setiap variabel baik variabel dependen maupun independen.

Total skor untuk 4 pertanyaan pada masing-masing variabel yaitu 20. Total nilai indeks adalah 100 dengan menggunakan kriteria 3 kotak (*Three-box Method*). Oleh karena itu, rentang 100 (10-100) akan menghasilkan interval sebesar 30 sebagai dasar interpretasi nilai indeks. Penggunaan 3 kotak (*Three-box Method*) terbagi sebagai berikut.

10,00 – 40,00 = Rendah

40,01 – 70,00 = Sedang

70,01 – 100,00 = Tinggi

4.3 Analisis Deskriptif dan Perhitungan Skor Variabel X dan Y

Tujuan dari analisis indeks jawaban per variabel adalah untuk mengetahui gambaran deskriptif tentang responden penelitian khususnya variabel-variabel atau item-item pertanyaan yang diajukan. Teknik penilaian berupa skor yang digunakan yaitu minimal 1 dan maksimal 5, sehingga perhitungan indeks jawaban responden dijabarkan dalam formula sebagai berikut.

$$\text{Nilai Indeks} = \{(\%F1 \times 1) + (\%F2 \times 2) + (\%F3 \times 3) + (\%F4 \times 4) + (\%F5 \times 5)\}/5$$

Keterangan :

F1 : frekuensi responden menjawab 1 dari skor yang digunakan dalam daftar pertanyaan kuesioner

F2 : frekuensi responden menjawab 2 dari skor yang digunakan dalam daftar pertanyaan kuesioner

F3 : frekuensi responden menjawab 3 dari skor yang digunakan dalam daftar pertanyaan kuesioner

F4 : frekuensi responden menjawab 4 dari skor yang digunakan dalam daftar pertanyaan kuesioner

F5 : frekuensi responden menjawab 5 dari skor yang digunakan dalam daftar pertanyaan kuesioner

4.4 Analisis Deskriptif dan Perhitungan Skor Variabel X

4.4.1 Analisis Deskriptif Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Persepsi setiap orang dapat diartikan berbeda oleh orang lain. Penelitian ini mengukur variabel kesadaran wajib pajak melalui 4 item pertanyaan. Hasil jawaban dan analisis indeks skor jawaban terhadap variabel kesadaran wajib pajak dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 4.4 Tanggapan Responden Mengenai Kesadaran Wajib Pajak

Item Pertanyaan	Skor										Indeks
	STS	%	TS	%	N	%	S	%	SS	%	
Pajak merupakan iuran rakyat yang digunakan untuk pembangunan	0	0	0	0	8	8	56	56.6	35	35	88.22
Pajak merupakan iuran rakyat yang digunakan untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi pemerintahan	0	0	2	2	8	8	66	66.7	23	23	85.46
Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang paling besar	1	1	2	2	8	8	50	51.5	38	38	89.48
Saya harus membayar pajak karena pajak merupakan kewajiban kita sebagai warga negara	0	0	0	0	7	7	38	38.4	54	55	89.48
Rata-Rata											86.66

Sumber: Data primer yang diolah (2016)

Tanggapan responden sebagaimana pada tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan Setuju (Skor 4) pada keempat item pertanyaan variabel Kesadaran Wajib Pajak. Rata-rata indeks skor jawaban variabel Kesadaran Wajib Pajak sebesar 86,66. Berdasarkan kategori indeks skor *Three-box Method*, maka rata-rata tersebut berada pada tingkatan skor tinggi. Kondisi ini menggambarkan bahwa wajib pajak dapat dikatakan memiliki kesadaran yang tinggi.

Pada pernyataan pertama, ada sebanyak 56,6 persen responden menjawab dengan setuju dan didukung oleh sebanyak 35 persen responden menjawab sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tergolong tinggi berdasarkan kesadaran bahwa pajak merupakan iuran rakyat yang digunakan untuk pembangunan. Dapat disimpulkan bahwa ada kesesuaian antara kesadaran wajib pajak dengan kesadaran bahwa pajak merupakan iuran rakyat yang digunakan untuk pembangunan.

Pada pertanyaan kedua, ada sebanyak 66,7 persen responden menjawab dengan setuju dan didukung oleh sebanyak 23 persen responden menjawab sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tergolong tinggi berdasarkan kesadaran bahwa pajak merupakan iuran rakyat yang digunakan untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi pemerintahan. Dapat disimpulkan bahwa ada kesesuaian antara kesadaran wajib pajak dengan kesadaran bahwa pajak merupakan iuran rakyat yang digunakan untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi pemerintahan.

Pada pertanyaan ketiga, ada sebanyak 51,5 persen responden menjawab dengan setuju dan didukung oleh sebanyak 38 persen responden menjawab sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tergolong tinggi

berdasarkan bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar. Dapat disimpulkan bahwa ada kesesuaian antara kesadaran wajib pajak dengan kesadaran bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar.

Pada pertanyaan keempat, ada sebanyak 38,4 persen responden menjawab dengan setuju dan didukung oleh sebanyak 54,5 persen responden menjawab sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tergolong tinggi berdasarkan bahwa pajak merupakan kewajiban kita sebagai warga negara. Dapat disimpulkan bahwa ada kesesuaian antara kesadaran wajib pajak dengan kesadaran bahwa pajak merupakan kewajiban kita sebagai warga negara.

4.4.2 Analisis Deskriptif Variabel Kualitas Pelayanan Pajak (X2)

Persepsi setiap orang dapat diartikan berbeda oleh orang lain. Penelitian ini mengukur variabel kesadaran wajib pajak melalui 4 item pertanyaan. Hasil jawaban dan analisis indeks skor jawaban terhadap variabel kualitas pelayanan pajak dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 4.5 Tanggapan Responden Mengenai Kualitas Pelayanan

Item Pertanyaan	Skor										Indeks
	STS	%	TS	%	N	%	S	%	SS	%	
Petugas pajak telah memberikan pelayanan pajak dengan baik	1	1	1	1	9	10	67	67.8	21	21.2	82.04
Saya merasa bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh petugas pajak dapat membantu pemahaman mengenai hak dan kewajiban saya selaku Wajib Pajak	1	1	2	2	8	8	62	63	26	26.9	83.16
Petugas pajak selalu memperhatikan keberatan Wajib Pajak atas pajak yang dikenakan	0	0	1	1	17	17	63	63.6	18	18.2	79.8
Cara membayar pajak adalah mudah/ efisien	0	0	1	1	4	4	66	66.7	28	28.3	84.46
Rata-Rata											82.37

Sumber: Data primer yang diolah (2016)

Tanggapan responden sebagaimana pada tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan Setuju (Skor 4) pada keempat item pertanyaan variabel Kualitas Layanan. Rata-rata indeks skor jawaban variabel Kualitas Layanan sebesar 82,37. Berdasarkan kategori indeks skor *Three-box Method*, maka rata-rata tersebut berada pada tingkatan skor **Tinggi**. Kondisi ini menggambarkan bahwa persepsi wajib pajak mengenai kualitas layanan pajak tinggi.

Pada pertanyaan pertama, ada sebanyak 67,8 persen responden menjawab dengan setuju dan didukung oleh sebanyak 21,2 persen responden menjawab sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas layanan pajak tergolong tinggi berdasarkan pelayanan petugas pajak yang baik. Dapat disimpulkan bahwa ada kesesuaian antara kualitas layanan pajak dengan pelayanan petugas pajak yang baik.

Pada pertanyaan kedua, ada sebanyak 63 persen responden menjawab dengan setuju dan didukung oleh sebanyak 26,9 persen responden menjawab sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas layanan pajak tergolong tinggi berdasarkan persepsi wajib pajak mengenai penyuluhan yang dilakukan oleh petugas pajak dapat membantu pemahaman mengenai hak dan kewajiban wajib pajak. Dapat disimpulkan bahwa ada kesesuaian antara kualitas layanan pajak dengan persepsi wajib pajak mengenai penyuluhan yang dilakukan oleh petugas pajak dapat membantu pemahaman mengenai hak dan kewajiban wajib pajak.

Pada pertanyaan ketiga, ada sebanyak 63,6 persen responden menjawab dengan setuju dan didukung oleh sebanyak 18,2 persen responden menjawab sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas layanan pajak tergolong tinggi berdasarkan perhatian petugas pajak mengenai keberatan wajib pajak atas pajak

yang dikenakan. Dapat disimpulkan bahwa ada kesesuaian antara kualitas layanan pajak dengan perhatian petugas pajak mengenai keberatan wajib pajak atas pajak yang dikenakan.

Pada pertanyaan keempat, ada sebanyak 66,7 persen responden menjawab dengan setuju dan didukung oleh sebanyak 28,3 persen responden menjawab sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas layanan pajak tergolong tinggi berdasarkan kemudahan dan efisiensi cara pembayaran pajak. Dapat disimpulkan bahwa ada kesesuaian antara kualitas pajak dengan kemudahan dan efisiensi cara pembayaran pajak.

4.4.3 Analisis Deskriptif Variabel Sanksi Perpajakan (X3)

Persepsi setiap orang tentang sanksi perpajakan dapat berbeda. Penelitian ini mengukur variabel sanksi perpajakan melalui 4 item pertanyaan. Hasil jawaban dan analisis indeks skor jawaban terhadap variabel sanksi perpajakan dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 4.6 Tanggapan Responden Mengenai Sanksi Perpajakan

Item Pertanyaan	Skor										Indeks
	STS	%	TS	%	N	%	S	%	SS	%	
Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan	0	0	2	2	6	6	61	61.7	30	30.3	84.06
Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran	0	0	0	0	6	6	64	64.7	29	29.3	84.66
Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan	0	0	0	0	7	7	59	59.6	33	33.4	85.28
Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku	0	0	0	0	3	3	59	59.6	37	37.4	86.88
Rata-Rata											85.22

Sumber: Data primer yang diolah (2016)

Tanggapan responden sebagaimana pada tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan Setuju (Skor 4) pada keempat item pertanyaan variabel Sanksi Perpajakan. Rata-rata indeks skor jawaban variabel Sanksi Perpajakan sebesar 85,22. Berdasarkan kategori indeks skor *Three-box Method*, maka rata-rata tersebut berada pada tingkatan skor **Tinggi**. Kondisi ini menggambarkan bahwa persepsi wajib pajak mengenai kepentingan sanksi perpajakan.

Pada pernyataan pertama, ada sebanyak 61,7 persen responden menjawab dengan setuju dan didukung oleh sebanyak 30,3 persen responden menjawab sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak mengenai kepentingan sanksi perpajakan tergolong tinggi berdasarkan persepsi wajib pajak tentang perlunya sanksi perpajakan agar tercipta kedisiplinan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dapat disimpulkan bahwa ada kesesuaian antara persepsi wajib pajak mengenai kepentingan sanksi perpajakan dengan persepsi wajib pajak tentang perlunya sanksi perpajakan agar tercipta kedisiplinan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Pada pertanyaan kedua, ada sebanyak 64,7 persen responden menjawab dengan setuju dan didukung oleh sebanyak 29,3 persen responden menjawab sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak mengenai kepentingan sanksi perpajakan tergolong tinggi berdasarkan persepsi wajib pajak mengenai pengenaan sanksi seharusnya dilaksanakan dengan tegas kepada semua Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran. Dapat disimpulkan bahwa ada kesesuaian antara persepsi wajib pajak mengenai kepentingan sanksi perpajakan dengan persepsi wajib pajak mengenai pengenaan sanksi

seharusnya dilaksanakan dengan tegas kepada semua Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran.

Pada pertanyaan ketiga, ada sebanyak 59,6 persen responden menjawab dengan setuju dan didukung oleh sebanyak 33,4 persen responden menjawab sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak mengenai kepentingan sanksi perpajakan tergolong tinggi berdasarkan persepsi wajib pajak mengenai sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak seharusnya sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa ada kesesuaian antara persepsi wajib pajak mengenai kepentingan sanksi perpajakan dengan persepsi wajib pajak mengenai sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak seharusnya sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan.

Pada pertanyaan keempat, ada sebanyak 59,6 persen responden menjawab dengan setuju dan didukung oleh sebanyak 37,4 persen responden menjawab sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak mengenai kepentingan sanksi perpajakan tergolong tinggi berdasarkan persepsi wajib pajak mengenai penerapan sanksi pajak seharusnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dapat disimpulkan bahwa ada kesesuaian antara persepsi wajib pajak mengenai kepentingan sanksi perpajakan dengan persepsi wajib pajak mengenai penerapan sanksi pajak seharusnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.5 Analisis Deskriptif dan Perhitungan Skor Variabel Y

Kepatuhan bisa dipersepsikan secara berbeda oleh orang yang berbeda. Penelitian ini mengukur variabel kepatuhan wajib pajak melalui 4 item

pertanyaan. Hasil jawaban dan analisis indeks skor jawaban terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 4.7 Tanggapan Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak

Item Pertanyaan	Skor										Indeks
	STS	%	TS	%	N	%	S	%	SS	%	
Secara umum dapat dikatakan bahwa saya paham Undang-Undang Perpajakan	1	1	6	6	22	22	59	59.6	11	11.1	74.74
Saya selalu mengisi formulir pajak dengan benar	0	0	4	4	12	12	63	63.7	20	20.2	80.2
Saya selalu menghitung pajak dengan jumlah yang benar	0	0	3	3	11	11	64	64.6	21	21.2	80.8
Saya selalu membayar pajak tepat pada waktunya	0	0	1	1	9	10	54	54.6	35	35.4	85.48
Rata-Rata											80.26

Sumber: Data primer yang diolah (2016)

Tanggapan responden sebagaimana pada tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan Setuju (Skor 4) pada keempat item pertanyaan variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Rata-rata indeks skor jawaban variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 80,26. Berdasarkan kategori indeks skor *Three-box Method*, maka rata-rata tersebut berada pada tingkatan skor **Tinggi**. Kondisi ini menggambarkan bahwa wajib pajak dapat dikatakan memiliki kepatuhan yang tinggi.

Pada pertanyaan pertama, ada sebanyak 59,6 persen responden menjawab dengan setuju dan didukung oleh sebanyak 11,1 persen responden menjawab sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tergolong tinggi berdasarkan pemahaman undang-undang perpajakan. Dapat disimpulkan bahwa ada kesesuaian antara kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman wajib pajak tentang undang-undang perpajakan.

Pada pertanyaan kedua, ada sebanyak 63,7 persen responden menjawab dengan setuju dan didukung oleh sebanyak 20,2 persen responden menjawab sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tergolong tinggi berdasarkan kebenaran isian formulir pajak. Dapat disimpulkan bahwa ada kesesuaian antara kepatuhan wajib pajak kebenaran isian formulir pajak.

Pada pertanyaan ketiga, ada sebanyak 64,6 persen responden menjawab dengan setuju dan didukung oleh sebanyak 21,2 persen responden menjawab sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tergolong tinggi berdasarkan kebenaran penghitungan pajak. Dapat disimpulkan bahwa ada kesesuaian antara kepatuhan wajib pajak dengan kebenaran penghitungan pajak.

Pada pertanyaan keempat, ada sebanyak 54,6 persen responden menjawab dengan setuju dan didukung oleh sebanyak 35,4 persen responden menjawab sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tergolong tinggi berdasarkan ketepatan waktu pembayaran pajak. Dapat disimpulkan bahwa ada kesesuaian antara kepatuhan wajib pajak dengan kebenaran ketepatan waktu pembayaran pajak.

4.6 Uji Kualitas Data

4.6.1 Uji Validitas

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan kriteria yang digunakan untuk menyatakan suatu instrumen dianggap valid atau layak digunakan dalam pengujian hipotesis. Adapun kriteria yang digunakan dalam menentukan valid tidaknya item pertanyaan kuesioner penelitian adalah sebagai berikut.

Tingkat kepercayaan = 95 persen ($\alpha = 0,05$)

Derajat kebebasan (df) = $n-3 = 99-3 = 96$

Sehingga, didapatkan r tabel = 0,1986

Jika r hitung (untuk masing-masing item pertanyaan) lebih besar dari r tabel dan nilai r positif, maka item pertanyaan dikatakan valid (Ghozali, 2005). Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka hasil pengujian validitas dapat ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	X1.1	0,674	Valid
	X1.2	0,727	Valid
	X1.3	0,795	Valid
	X1.4	0,724	Valid
Kualitas Layanan (X2)	X2.1	0,851	Valid
	X2.2	0,845	Valid
	X2.3	0,763	Valid
	X2.4	0,712	Valid
Sanksi Perpajakan (X3)	X3.1	0,736	Valid
	X3.2	0,741	Valid
	X3.2	0,774	Valid
	X3.4	0,604	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1.1	0,786	Valid
	Y1.2	0,869	Valid
	Y1.3	0,750	Valid
	Y1.4	0,600	Valid

Sumber : Data primer yang diolah (2016)

Tabel tersebut menjelaskan bahwa semua item pertanyaan dalam kuesioner penelitian mempunyai koefisien korelasi yang lebih besar dari r tabel = 0,1986 (nilai r tabel untuk n=99), sehingga semua item pertanyaan tersebut valid.

4.6.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Butir pertanyaan dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten.

Dalam penelitian ini digunakan fasilitas *Cronbach Alpha* yang terdapat dalam bantuan komputer SPSS. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* > 0,60.

Adapun hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0,745	Reliabel
Kualitas Pelayanan	0,708	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,805	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,681	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah (2016)

Berdasarkan tabel 4.9 hasil uji reliabilitas di atas, maka dapat disimpulkan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini telah reliabel karena keseluruhan variabel memiliki nilai *Cronbach Alpha* yang lebih besar dari 0,60 sehingga layak digunakan untuk menjadi alat ukur instrumen kuesioner dalam penelitian ini.

4.7 Uji Asumsi Klasik

4.7.1 Uji Multikolinearitas

Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Kesadaran Wajib Pajak	.677	1.476
Kualitas Pelayanan	.616	1.624
Sanksi Perpajakan	.708	1.413

Sumber: Data primer yang diolah (2016)

Tabel di atas menunjukkan bahwa koefisien korelasi antar variabel bebas lebih besar dari 0,60. Variabel bebas dikatakan memiliki korelasi di antara sesamanya apabila memiliki nilai VIF lebih dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tersebut tidak terdapat masalah multikolinearitas, maka model regresi ini layak untuk dipakai.

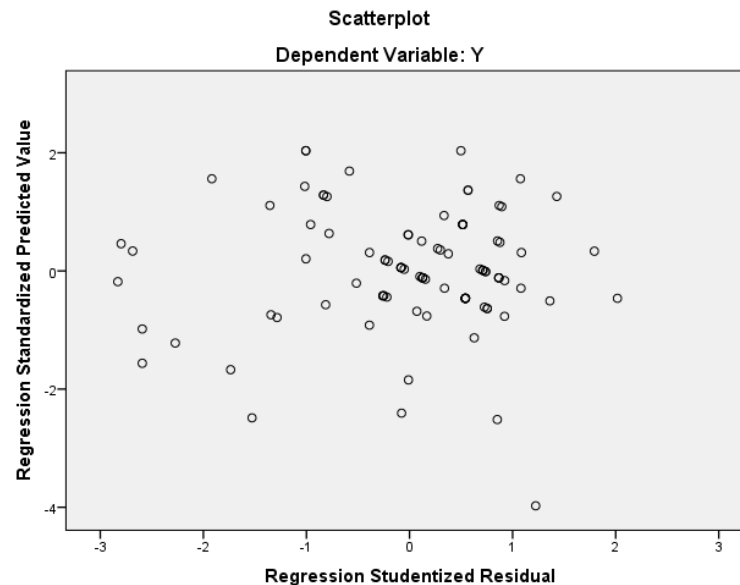
4.7.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Salah satu uji untuk menguji heteroskedastisitas ini adalah dengan melihat penyebaran dari varians residual.

Uji Heteroskedastisitas dengan cara melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *Scatter Plot* antara SRESID dan ZPRED di mana sumbu y adalah y

yang telah diprediksi, dan sumbu x adalah residual (y prediksi $- y$ sesungguhnya) yang telah *studentized*.

Gambar 4.1 Scatterplot



Sumber: Data Primer yang diolah (2016)

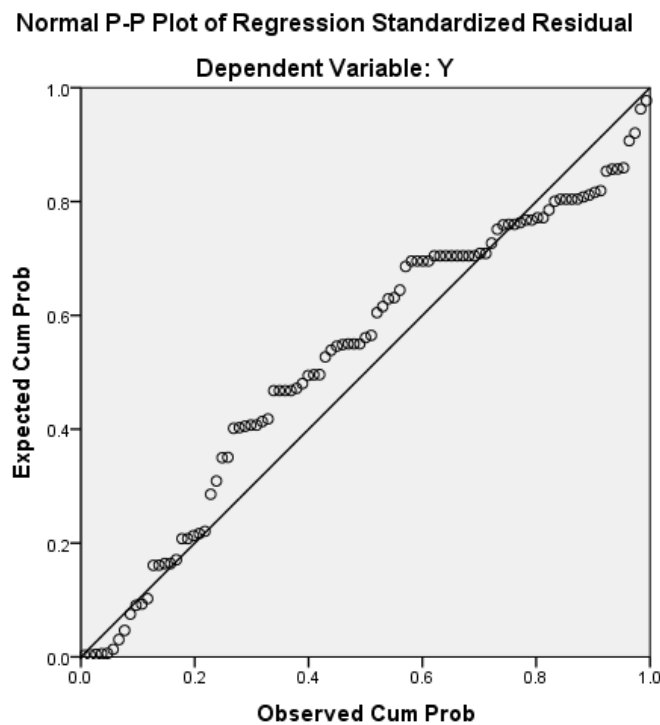
Berdasarkan gambar 4.1 di atas, dapat diketahui bahwa data (titik-titik) menyebar secara merata di atas dan di bawah garis nol, tidak berkumpul di satu tempat, serta tidak membentuk pola tertentu sehingga dapat disimpulkan bahwa uji regresi ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

4.7.3 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Metode yang dapat digunakan adalah *Normal Probability Plot of Regression Standardized Residual* di mana apabila data menyebar di sekitar garis diagonal atau mengikuti garis

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Hasil uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut ini.

Gambar 4.2 Normal probability plot of regression



Sumber: Data primer yang diolah (2016)

Berdasarkan tampilan grafik Normal P-plot di atas, dapat disimpulkan bahwa pola grafik normal terlihat dari titik-titik yang menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Berdasarkan grafik Normal P-plot, menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai dalam penelitian ini karena memenuhi asumsi normalitas.

4.8 Analisis Regresi Linier Berganda

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Tujuan analisis regresi berganda adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

Tabel 4.11 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1.025	1.595		-.642	.552
Kesadaran Wajib Pajak	.282	.087	.256	3.230	.002
Kualitas Pelayanan	.492	.086	.476	5.718	.000
Sanksi Perpajakan	.244	.099	.191	2.456	.016

Sumber: Data primer yang diolah (2016)

Berdasarkan tabel 4.11 persamaan regresi linear berganda, yang dibaca adalah nilai dalam kolom B, baris pertama menunjukkan konstanta (α) dan baris selanjutnya menunjukkan koefisien variabel independen. Berdasarkan tabel 4.15 model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$Y = -1.025 + 0.282 X_1 + 0.492 X_2 + 0.244 X_3 + e \dots\dots\dots$$

Nilai konstanta dengan koefisien regresi pada tabel 4.15 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Koefisien variabel kesadaran wajib pajak (X_1) sebesar 0,282 berarti setiap kenaikan kesadaran wajib pajak sebesar 1%, maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,282%.

2. Koefisien variabel kualitas pelayanan (X2) sebesar 0,492 berarti setiap kenaikan kualitas pelayanan sebesar 1%, maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,492%.
3. Koefisien variabel sanksi perpajakan (X3) sebesar 0,244, berarti setiap kenaikan sanksi perpajakan sebesar 1%, maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,244%.

4.9 Pengujian Hipotesis

4.9.1 Uji F

Ghozali (2006:84) uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Uji F dilakukan berdasarkan nilai probabilitas. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak, artinya ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4.12 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	260.386	3	86.795	46.434	.000 ^b
	Residual	177.574	95	1.869		
	Total	437.960	98			

Sumber: Data primer yang diolah (2016)

Berdasarkan tabel 4.12 dapat dilihat bahwa hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 46.434 dengan signifikan sebesar 0,000. Nilai signifikan tersebut lebih kecil daripada 0,05, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Artinya, setiap perubahan yang terjadi pada variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan secara bersama-sama akan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak di Kantor Samsat Kabupaten Kepulauan Selayar.

4.9.2 Uji t

Tabel 4.13 Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.025	1.595		-.642	.522
	Kesadaran Wajib Pajak	.282	.087	.256	3.230	.002
	Kualitas Pelayanan	.492	.086	.476	5.718	.000
	Sanksi Perpajakan	.244	.099	.191	2.456	.016

Sumber: Data primer yang diolah (2016)

Berdasarkan tabel 4.13 di atas, pengaruh dari masing-masing variabel kesadaran wajib pajak (X1), kualitas pelayanan (X2), dan sanksi perpajakan (X3), terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dilihat dari tingkat signifikan (probabilitas),

arah tanda variabel pengetahuan wajib pajak (X1), penyuluhan pajak (X2), kualitas pelayanan fiskus (X3), dan pemeriksaan pajak (X4) terhadap kepatuhan formal wajib pajak (Y) mempunyai arah yang positif. Keempat variabel independen tersebut juga berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Dengan melihat tabel 4.16 di atas, maka analisis regresi linear berganda dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan tabel 4.11 secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 3,230 dengan signifikansi 0,002. Rasio kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, karena nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan yang terjadi pada rasio kesadaran wajib pajak akan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, koefisien transformasi regresi yang positif juga menunjukkan bahwa rasio pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh positif yang ditunjukkan oleh kesadaran wajib pajak mengindikasikan bahwa apabila kesadaran wajib pajak mengalami kenaikan maka angka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan pula, begitupun sebaliknya.

Jadi hipotesis yang diajukan yaitu, “kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak”, dapat diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Marjan (2014) di mana terdapat pengaruh positif signifikan antara kesadaran terhadap kepatuhan pajak.

2. Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 4.11 secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 5,718 dengan signifikansi 0,000. Rasio kualitas pelayanan pajak berpengaruh

secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, karena nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan yang terjadi pada rasio kualitas pelayanan pajak akan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, koefisien transformasi regresi yang positif juga menunjukkan bahwa rasio kualitas pelayanan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh positif yang ditunjukkan oleh kualitas pelayanan pajak mengindikasikan bahwa apabila kualitas pelayanan pajak mengalami kenaikan maka angka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan pula, begitupun sebaliknya.

Jadi hipotesis yang diajukan yaitu, “kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak”, dapat diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Muttia (2014) di mana terdapat pengaruh positif signifikan antara kesadaran terhadap kepatuhan pajak.

3. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 4.11 secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 2,456 dengan signifikansi 0,016. Rasio sanksi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, karena nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan yang terjadi pada rasio sanksi perpajakan akan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, koefisien transformasi regresi yang positif juga menunjukkan bahwa rasio pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh positif yang ditunjukkan oleh sanksi perpajakan mengindikasikan bahwa apabila pengetahuan wajib pajak

mengalami kenaikan maka angka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan pula, begitupun sebaliknya.

Jadi hipotesis yang diajukan yaitu, “sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak”, dapat diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Putri (2012) dimana terdapat pengaruh positif signifikan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut.

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak pun akan tinggi.
2. Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas pelayanan pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi.
3. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sanksi perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Diperlukan adanya kesadaran diri dari wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, petugas pajak

perlu memberikan sosialisasi ataupun edukasi pajak terhadap wajib pajak secara rutin.

2. Sikap profesionalitas, kualitas sarana dan prasarana, serta pelayanan yang prima petugas pajak harus ditingkatkan agar wajib pajak merasa lebih nyaman sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak.
3. Petugas pajak harus lebih aktif dalam memberikan informasi dan pemungutan pajak kepada wajib pajak sehingga wajib pajak tahu kapan membayar dan terhindar dari sanksi. Petugas pajak juga harus meningkatkan ketegasan sanksi pajak kepada wajib pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Darwin. 2010. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*, Cetakan Keempat, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hamdi, Asep Saipul dan Bahrudin, E. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Harinurudin. 2009. Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, (Online), Vol. 16, (<http://journal.ui.ac.id/index.php/jbb/article/viewFile/610/595>, diakses 16 Mei 2015).
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE.
- Kesadaran Wajib Pajak*. (Online) <http://zetzu.blogspot.com/2011/08/kesadaran-wajib-pajak.html> (diakses tanggal 9 April 2015)
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan (Edisi Revisi 2011)*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Marjan, Restu Mutmainnah. 2014. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan*. Skripsi Tidak diterbitkan. Makassar: Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Musniati, 2014. *Pengaruh Denda, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan*. Skripsi Tidak diterbitkan. Makassar: Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Mutia, Sri Putri Tita. 2014. *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Skripsi Tidak diterbitkan. Padang: Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Pengertian Pelayanan. (online) (<http://www.pengertianahli.com/2014/08/pengertian-pelayanan-apa-itu-pelayanan.html>, diakses 9 April 2015)

Putri, Amanda R. Siswanto dan Jati, I Ketut. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Denpasar*. Skripsi Tidak diterbitkan. Denpasar: Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.

Republik Indonesia. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK/03/2012 Tentang Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2013. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Robbins, Stephen P. dan Judge, Timothy A. 2008. *Perilaku Organisasi*. Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat.

Suartana, I Wayan. 2010. *Akuntansi Keprilakuan-Teori dan Implementasi*. Jakarta: Penerbit Andi

Sugiyono, 2013. *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta.

Suntoyo, Danang. 2013. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: Refika Aditama.

Susanto, Herry. 2012. *Membangun Kesadaran dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak*. (Online), (<http://www.pajak.go.id/content/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak>, diakses 15 Agustus 2015).

Umar, Husein. 2002. *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Utomo, Bayu Ageng Wahyu. 2011. *Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan*. Skripsi Tidak diterbitkan. Jakarta: Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Zuraida, Ida. 2012. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1**BIODATA****Identitas Diri**

Nama : Nur Wachida Cinitya Lestari
 Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 22 Juni 1993
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat Rumah : Jl. Pelita Taeng, BTN Gowa Pelita Mas
 A7/18-19
 Telepon Rumah dan HP : 085656671923
 Alamat *E-mail* : nurwachidacl@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

1. 2005 : SDN Kelapa Dua 04 Pagi Jakarta Barat
2. 2008 : SMP Negeri 6 Makassar
3. 2011 : SMA Negeri 4 Semarang
4. 2016 : S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Pendidikan Nonformal/Training/Seminar

1. Pelatihan *Basic Study Skill*, Hasanuddin University (2011)
2. Latihan Kepemimpinan Tingkat Pertama (LK1), IMA FEB-UH (2012)
3. Seminar Nasional 7th Hasanuddin Accounting Days "*Enhancing Accountability In Public Sector*", IMA FEB-UH (2013)

Pengalaman Organisasi

1. Keluarga Mahasiswa Ikatan Mahasiswa Akuntansi (IMA) FEB-UH
2. Pengurus Ikatan Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Periode 2013-2014

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya.

Makassar, 2016

Nur Wachida Cinitya Lestari

LAMPIRAN 2

KUESIONER PENELITIAN

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan maksud untuk menyusun skripsi yang berjudul “Faktor – Faktor yang Memengaruhi Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus SAMSAT Kabupaten Kepulauan Selayar)”, maka diperlukan data penelitian sesuai dengan judul tersebut.

Identitas peneliti:

Nama/ NIM	: Nur Wachida Cinitya Lestari/ A31111260
Program Studi	: Akuntansi
Fakultas/ Instansi	: Ekonomi/ Universitas Hasanuddin

Peneliti menyadari sepenuhnya, kuesioner ini sedikit meminta waktu aktivitas Bapak/Ibu yang sangat padat. Namun demikian dengan segala kerendahan hati peneliti memohon kiranya Bapak/Ibu berkenan meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini. Kerahasiaan jawaban Bapak/Ibu sepenuhnya dijamin dan jawaban tersebut semata-mata hanya diperlukan untuk kepentingan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini.

Atas perhatian serta kerjasama Bapak/Ibu, Peneliti ucapkan Terima Kasih.

Hormat saya

(Nur Wachida Cinitya Lestari)

No:

IDENTITAS RESPONDEN

Nama Responden :

Jenis Kelamin : Laki – Laki / Perempuan *)

Usia :

Pekerjaan :

Ket: *) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

Berikut merupakan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan Faktor – Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor . Bapak/ Ibu dimohon untuk dapat menjawab setiap pertanyaan dengan keyakinan tinggi serta tidak mengosongkan satu jawaban pun dan tiap pertanyaan hanya boleh ada satu jawaban. Menjawab pertanyaan dengan cara memberi *checklist* (✓) pada salah satu jawaban yang dianggap paling sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Keterangan:

STS : Sangat Tidak Setuju
 TS : Tidak Setuju
 N : Netral
 S : Setuju
 SS : Sangat Setuju

• Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Secara umum dapat dikatakan bahwa saya paham Undang-Undang Perpajakan					
2.	Saya selalu mengisi formulir pajak dengan benar					
3.	Saya selalu menghitung pajak dengan jumlah yang benar					
4.	Saya selalu membayar pajak tepat pada waktunya					

• Kesadaran Wajib Pajak

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Pajak merupakan iuran rakyat yang digunakan untuk pembangunan					
2.	Pajak merupakan iuran rakyat yang digunakan untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi pemerintahan					
3.	Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang paling besar					
4.	Saya harus membayar pajak karena pajak merupakan kewajiban kita sebagai warga negara					

• **Kuaitas Pelayanan**

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Petugas pajak telah memberikan pelayanan pajak dengan baik					
2.	Saya merasa bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh petugas pajak dapat membantu pemahaman mengenai hak dan kewajiban saya selaku Wajib Pajak					
3.	Petugas pajak selalu memperhatikan keberatan Wajib Pajak atas pajak yang dikenakan					
4.	Cara membayar pajak adalah mudah/ efisien					

• **Sanksi Perpajakan**

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan					
2.	Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran					
3.	Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan					
4.	Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku					

LAMPIRAN 3

DAFTAR RESPONDEN PENELITIAN				
NO	NAMA	JENIS KELAMIN	USIA (TH)	PEKERJAAN
1	Andi Kamara	L	50	PNS
2	Erniati, Se	P	40	PNS
3	A. Nurdiana	P	37	LAIN-LAIN
4	Zulkifli	L	21	MAHASISWA
5	Rahmat Hidayat	L	28	WIRASWASTA
6	Syamsuddin	L	52	NELAYAN
7	Sagala	L	44	PETANI
8	Wahyudin	L	23	WIRASWASTA
9	James Lontoh	L	38	LAIN-LAIN
10	Mawadi	L	32	PNS
11	A. Dimutra	L	26	WIRASWASTA
12	Syahwan	L	33	LAIN-LAIN
13	A. Dessy	P	25	PNS
14	Rahmawati	P	32	PNS
15	Sukardi	L	31	WIRASWASTA
16	Mappaliwang	L	53	PNS
17	M. Armin	L	34	WIRASWASTA
18	Haiwiyah	P	33	IRT
19	Marliana	P	28	PNS
20	Hildawati	P	26	LAIN-LAIN
21	Sitti Naima	P	20	IRT
22	Abdullah	L	38	NELAYAN
23	Fahriady	L	29	WIRASWASTA
24	Muhammad Husni, S.Ag	L	48	LAIN-LAIN
25	St. Nur Aeni	P	47	LAIN-LAIN
26	St. Hadijah	P	26	PNS
27	A. Erfandi	L	35	WIRASWASTA
28	Muh. Saleh	L	51	PNS
29	A. Saiful Herman, Sh	L	49	PNS
30	Ratnawaty Jusuf	P	45	PNS
31	Andi Jamilah, S.Pd	P	41	PNS
32	Adhar	L	29	WIRASWASTA
33	A. Hasbi	L	41	LAIN-LAIN
34	Jumaruddin	L	39	PNS
35	Andi Irwan	L	40	WIRASWASTA
36	lin	P	18	MAHASISWA
37	Abdullah	L	55	PETANI

38	Suparman	L	29	WIRASWASTA
39	Mustafa	L	45	PNS
40	Samsuddin	L	43	PETANI
41	Dahlia	P	37	WIRASWASTA
42	A. Rappo	L	35	PNS
43	Amalia	P	20	WIRASWASTA
44	Nurdin N.	L	35	PETANI
45	H. Ahmad Yunus	L	60	PENSIUNAN
46	Sudin	L	42	WIRASWASTA
47	Sabdan B.	L	29	WIRASWASTA
48	A. Rahmayani	P	32	PNS
49	Siti M	P	40	IRT
50	Syamsuddin. S	L	45	WIRASWASTA
51	Sudirman	L	45	PETANI
52	Muhiddin	L	43	PETANI
53	Abdul Hakim	L	38	WIRASWASTA
54	Muh. Ali	L	25	PNS
55	Nurdin N.	L	38	PETANI
56	Lusianti	P	30	IRT
57	Supriadi	L	41	WIRASWASTA
58	Sudini	P	38	WIRASWASTA
59	Suharni	P	44	IRT
60	Makassau	L	27	PNS
61	Asriadin	L	31	WIRASWASTA
62	Fachreza	L	28	WIRASWASTA
63	Abd. Rahim	L	63	PENSIUNAN
64	Rudi Salam, St	L	31	PNS
65	Piang	L	25	PNS
66	Andi Rizal	L	42	WIRASWASTA
67	Japaruddin	L	45	WIRASWASTA
68	Arifuddin	L	48	PETANI
69	Jumna	L	40	PNS
70	Fika	P	29	IRT
71	Samsudi	L	57	WIRASWASTA
72	Andi Jamiah	P	41	WIRASWASTA
73	Andi Jumiya	P	39	WIRASWASTA
74	Diva Hersa M.	P	18	MAHASISWA
75	Sampara	L	47	PETANI
76	Samsul	L	32	WIRASWASTA
77	Sulastri	P	34	PNS
78	Muldiar	L	32	NELAYAN
79	Agus Sandrawati	P	35	PNS

80	Agus Sandrawati	L	39	PNS
81	Rian	L	36	WIRASWASTA
82	Ahmad Miskat	L	28	MAHASISWA
83	Kifli	L	18	WIRASWASTA
84	Safri	L	27	PNS
85	Muhammad Thamrin	L	34	PNS
86	Muhammad Ihsan	L	45	PNS
87	Muh. Yusuf	L	42	WIRASWASTA
88	Harfina, S.Pd	P	34	PNS
89	Muh. Sukri	L	48	WIRASWASTA
90	Fitriyani	P	41	PNS
91	Andi Suriani	P	38	PNS
92	El Ma'aruf	L	26	PNS
93	Nur Kamal Latif	L	43	PNS
94	Muh. Hidayat A.	L	23	MAHASISWA
95	Ibrahim	L	49	PNS
96	Iskandar	L	35	PNS
97	Sitti Aisyah	P	34	PNS
98	Arli	L	32	PNS
99	Andi Husnawati	P	35	PNS

LAMPIRAN 4**Hasil Data Olahan SPSS****UJI RELIABILITAS X1**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.745	4

UJI RELIABILITAS X2

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.708	4

UJI RELIABILITAS X3

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.805	4

UJI RELIABILITAS Y

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.681	4

UJI VALIDITAS X1

		Correlations				
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1
X1.1	Pearson Correlation	1	.327**	.325**	.382**	.674**
	Sig. (2-tailed)		.001	.001	.000	.000
	N	99	99	99	99	99
X1.2	Pearson Correlation	.327**	1	.481**	.334**	.727**
	Sig. (2-tailed)	.001		.000	.001	.000
	N	99	99	99	99	99
X1.3	Pearson Correlation	.325**	.481**	1	.425**	.795**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000		.000	.000
	N	99	99	99	99	99
X1.4	Pearson Correlation	.382**	.334**	.425**	1	.724**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000		.000
	N	99	99	99	99	99
X1	Pearson Correlation	.674**	.727**	.795**	.724**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	99	99	99	99	99

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

UJI VALIDITAS X2

		Correlations				
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2
X2.1	Pearson Correlation	1	.635**	.616**	.425**	.851**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	99	99	99	99	99
X2.2	Pearson Correlation	.635**	1	.457**	.548**	.845**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	99	99	99	99	99
X2.3	Pearson Correlation	.616**	.457**	1	.351**	.763**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	99	99	99	99	99
X2.4	Pearson Correlation	.425**	.548**	.351**	1	.712**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	99	99	99	99	99
X2	Pearson Correlation	.851**	.845**	.763**	.712**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	99	99	99	99	99

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

UJI VALIDITAS X3

		Correlations				
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3
X3.1	Pearson Correlation	1	.388**	.405**	.242*	.736**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.016	.000
	N	99	99	99	99	99
X3.2	Pearson Correlation	.388**	1	.509**	.245*	.741**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.015	.000
	N	99	99	99	99	99
X3.3	Pearson Correlation	.405**	.509**	1	.296**	.774**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.003	.000
	N	99	99	99	99	99
X3.4	Pearson Correlation	.242*	.245*	.296**	1	.604**
	Sig. (2-tailed)	.016	.015	.003		.000
	N	99	99	99	99	99
X3	Pearson Correlation	.736**	.741**	.774**	.604**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	99	99	99	99	99

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

UJI VALIDITAS Y

		Correlations				
		Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y
Y1.1	Pearson Correlation	1	.638**	.453**	.206*	.786**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.041	.000
	N	99	99	99	99	99
Y1.2	Pearson Correlation	.638**	1	.567**	.400**	.869**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	99	99	99	99	99
Y1.3	Pearson Correlation	.453**	.567**	1	.257*	.750**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.010	.000
	N	99	99	99	99	99
Y1.4	Pearson Correlation	.206*	.400**	.257*	1	.600**
	Sig. (2-tailed)	.041	.000	.010		.000
	N	99	99	99	99	99
Y	Pearson Correlation	.786**	.869**	.750**	.600**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	99	99	99	99	99

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

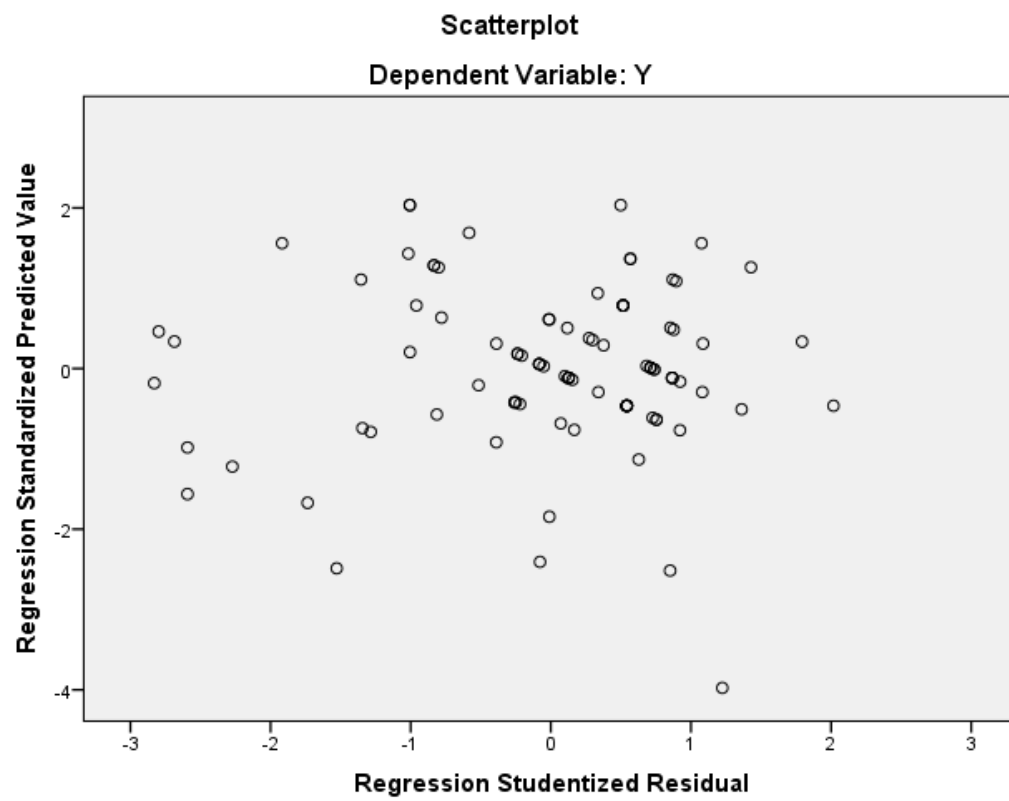
* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

UJI MULTIKOLINEARITAS

Collinearity Statistics	
Tolerance	VIF
.677	1.476
.616	1.624
.708	1.413

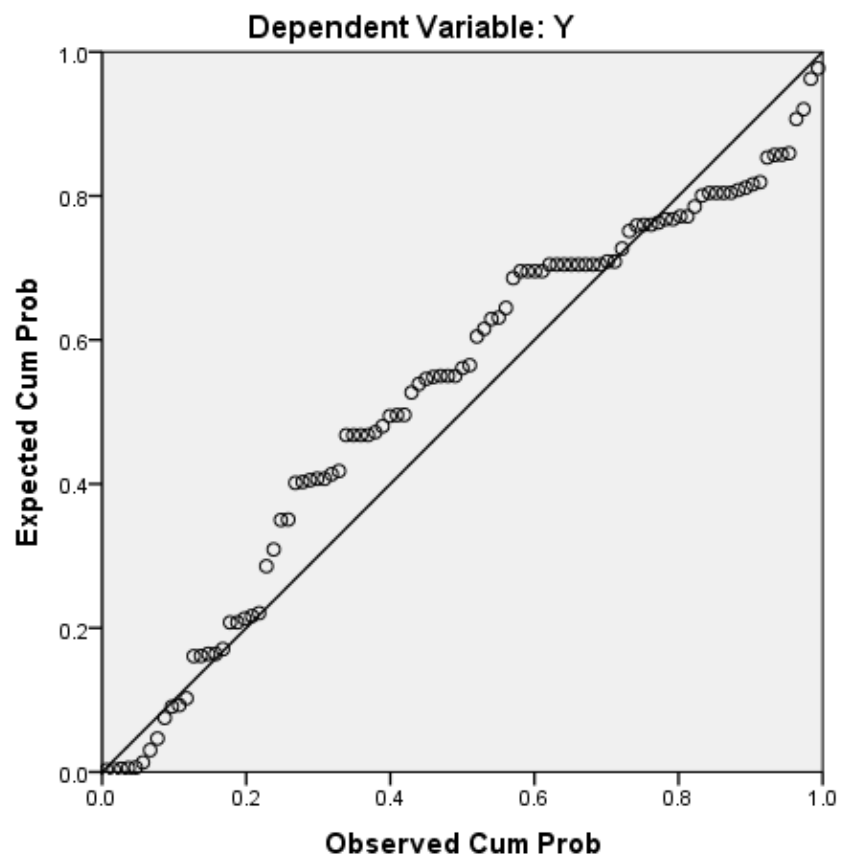
a. Dependent Variable: Y

UJI HETEROSKEDASTISITAS



UJI NORMALITAS

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



UJI REGRESI LINIEAR BERGANDA

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-1.025	1.595		-.642	.522		
X1	.282	.087	.256	3.230	.002	.677	1.476
X2	.492	.086	.476	5.718	.000	.616	1.624
X3	.244	.099	.191	2.456	.016	.708	1.413

a. Dependent Variable: Y

UJI T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1.025	1.595		-.642	.522
X1	.282	.087	.256	3.230	.002
X2	.492	.086	.476	5.718	.000
X3	.244	.099	.191	2.456	.016

a. Dependent Variable: Y

UJI F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	260.386	3	86.795	46.434	.000 ^b
Residual	177.574	95	1.869		
Total	437.960	98			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

LAMPIRAN 5

RESPONDEN	PERNYATAAN																							
	Y						X1						X2						X3					
	Y1	Y2	Y3	Y4	RATA-RATA	JUMLAH	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	RATA-RATA	JUMLAH	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	RATA-RATA	JUMLAH	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	RATA-RATA	JUMLAH
1	3	4	5	5	4	17	5	4	5	5	5	19	3	5	3	5	4	16	5	5	4	4	5	18
2	3	4	5	5	4	17	5	4	5	5	5	19	3	5	3	5	4	16	5	5	4	5	5	19
3	3	4	4	5	4	16	4	4	5	4	4	17	4	5	4	4	4	17	4	4	5	5	5	18
4	3	3	3	4	3	13	3	4	5	5	4	17	4	4	3	4	4	15	4	3	3	5	4	15
5	5	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	20
6	5	4	4	5	5	18	4	5	4	4	4	17	4	4	5	4	4	17	5	4	4	5	5	18
7	5	5	5	5	5	20	5	4	5	5	5	19	5	5	4	5	5	19	5	5	5	5	5	20
8	4	4	5	3	4	16	5	4	5	5	5	19	4	5	4	5	5	18	4	5	5	5	5	19
9	4	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	16	4	2	4	4	4	14	4	4	5	5	5	18
10	3	4	4	4	4	15	4	4	5	4	4	17	4	4	3	4	4	15	2	5	5	5	4	17
11	4	4	4	5	4	17	4	5	4	5	5	18	4	4	4	4	4	16	4	4	4	5	4	17
12	5	5	5	5	5	20	4	5	5	5	5	19	5	5	5	4	5	19	4	5	5	4	5	18
13	4	4	4	3	4	15	5	4	5	5	5	19	4	4	4	4	4	16	4	4	4	5	4	17
14	4	4	4	4	4	16	5	4	5	5	5	19	4	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	16
15	4	4	5	4	4	17	4	4	4	4	4	16	5	4	4	4	4	17	5	4	4	4	4	17
16	4	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	16
17	4	5	4	4	4	17	4	5	4	4	4	17	4	4	5	4	4	17	4	4	4	4	4	16
18	4	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	16	4	3	4	4	4	15
19	2	2	2	4	3	10	3	3	3	5	4	14	3	3	4	4	4	14	3	3	4	5	4	15
20	2	3	4	4	3	13	4	4	4	5	4	17	4	4	4	5	4	17	5	5	5	4	5	19
21	4	4	4	4	4	16	5	4	4	4	4	17	5	4	4	4	4	17	4	4	4	5	4	17
22	4	4	5	4	4	17	4	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	16	4	5	5	4	5	18
23	4	4	4	4	4	16	5	4	4	5	5	18	4	4	5	5	5	18	4	5	5	4	5	18
24	4	4	4	4	4	16	5	4	4	5	5	18	4	5	4	4	4	17	5	5	5	4	5	19
25	3	4	4	4	4	15	5	4	4	5	5	18	4	4	3	4	4	15	4	4	4	4	4	16
26	3	4	4	5	4	16	4	4	5	5	5	18	4	3	4	4	4	15	4	5	5	5	5	19
27	3	4	4	5	4	16	4	4	5	5	5	18	4	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	16
28	4	4	4	5	4	17	4	4	4	5	4	17	4	4	4	4	4	16	5	4	4	5	5	18

RESPONDEN	PERNYATAAN																							
	Y						X1						X2						X3					
	Y1	Y2	Y3	Y4	RATA-RATA	JUMLAH	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	RATA-RATA	JUMLAH	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	RATA-RATA	JUMLAH	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	RATA-RATA	JUMLAH
29	4	4	4	5	4	17	4	4	4	5	4	17	4	4	4	4	4	16	5	4	4	5	5	18
30	3	5	5	5	5	18	5	4	4	5	5	18	4	5	4	4	4	17	5	4	4	5	5	18
31	4	4	4	5	4	17	5	5	5	5	5	20	4	4	4	4	4	16	5	4	4	4	4	17
32	3	4	4	4	4	15	4	3	2	4	3	13	4	4	4	4	4	16	4	4	5	5	5	18
33	4	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	16
34	4	4	3	3	4	14	5	4	5	4	5	18	3	4	3	4	4	14	4	4	4	5	4	17
35	4	5	4	4	4	17	4	4	4	5	4	17	4	4	3	4	4	15	4	5	4	5	5	18
36	5	5	4	5	5	19	5	4	5	5	5	19	4	4	5	5	5	18	5	5	4	5	5	19
37	4	4	4	5	4	17	5	5	5	5	5	20	4	5	4	5	5	18	5	5	5	5	5	20
38	4	3	4	5	4	16	4	5	5	5	5	19	5	5	5	4	5	19	5	5	5	5	5	20
39	5	5	5	4	5	19	4	4	5	5	5	18	5	5	5	4	5	19	5	4	5	4	5	18
40	4	4	4	4	4	16	5	4	5	4	5	18	4	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	16
41	4	5	5	5	5	19	4	4	5	5	5	18	4	4	5	4	4	17	4	4	5	4	4	17
42	4	4	5	5	5	18	4	4	5	5	5	18	5	4	5	5	5	19	4	5	4	4	4	17
43	4	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	16
44	4	4	4	5	4	17	5	4	4	4	4	17	5	4	4	4	4	17	5	5	5	5	5	20
45	4	4	4	5	4	17	4	5	5	5	5	19	4	4	5	5	5	18	5	5	5	5	5	20
46	4	4	4	4	4	16	5	5	5	4	5	19	4	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	16
47	5	5	4	4	5	18	5	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	20
48	2	3	3	3	3	11	3	4	3	3	3	13	4	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	16
49	4	5	4	5	5	18	4	5	4	5	5	18	4	5	4	5	5	18	4	5	4	5	5	18
50	4	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	16
51	4	4	4	5	4	17	4	4	5	4	4	17	5	5	4	4	5	18	5	5	4	4	5	18
52	3	4	3	5	4	15	3	3	4	4	4	14	5	4	4	4	4	17	4	4	5	5	5	18
53	4	4	5	5	5	18	4	5	5	5	5	19	4	4	5	4	4	17	4	4	4	5	4	17
54	5	4	5	4	5	18	5	5	4	4	5	18	5	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	20
55	4	4	4	4	4	16	4	4	5	5	5	18	4	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	16
56	4	4	4	4	4	16	4	5	3	4	4	16	4	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	16
57	4	4	5	4	4	17	4	4	5	5	5	18	4	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	16

RESPONDEN	PERNYATAAN																								
	Y						X1						X2						X3						
	Y1	Y2	Y3	Y4	RATA-RATA	JUMLAH	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	RATA-RATA	JUMLAH	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	RATA-RATA	JUMLAH	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	RATA-RATA	JUMLAH	
58	4	4	4	4	4	16	5	4	5	5	5	19	4	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	16	
59	4	4	4	4	4	16	5	4	5	5	5	19	4	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	16	
60	4	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	16	
61	4	4	4	4	4	16	4	4	5	5	5	18	4	4	4	5	4	17	4	4	4	4	4	16	
62	3	5	5	4	4	17	5	5	5	5	5	20	5	5	4	5	5	19	4	4	5	4	4	17	
63	4	4	5	4	4	17	5	5	5	5	5	20	5	5	4	5	5	19	4	5	4	4	4	17	
64	2	3	3	2	3	10	3	3	4	3	3	13	4	3	3	3	3	13	2	3	3	4	3	12	
65	4	5	4	5	5	18	5	4	4	5	5	18	4	5	4	5	5	18	5	4	5	4	5	18	
66	4	5	4	5	5	18	5	4	4	5	5	18	4	5	4	5	5	18	5	4	5	4	5	18	
67	4	5	4	5	5	18	4	5	4	5	5	18	4	5	4	5	5	18	5	4	5	4	5	18	
68	5	5	4	4	5	18	4	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	16	
69	4	4	4	5	4	17	4	4	5	5	5	18	4	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	16	
70	4	4	4	4	4	16	4	5	4	5	5	18	4	4	4	5	4	17	3	5	4	4	4	16	
71	4	4	4	5	4	17	5	3	5	5	5	18	4	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	16	
72	3	4	4	4	4	15	4	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	16	4	3	3	4	4	14	
73	4	4	4	4	4	16	3	4	4	4	4	15	4	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	16	
74	3	5	5	5	5	18	5	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	20	
75	4	5	4	4	4	17	4	4	4	4	4	16	4	5	4	4	4	17	4	4	5	4	4	17	
76	4	4	4	4	4	16	5	5	4	4	5	18	4	4	5	4	4	17	3	4	4	3	4	14	
77	3	4	4	5	4	16	4	4	5	4	4	17	4	4	4	4	4	16	4	4	5	4	4	17	
78	4	4	4	5	4	17	4	4	4	4	4	16	5	5	4	4	5	18	4	4	5	4	4	17	
79	4	4	3	4	4	15	5	5	4	4	5	18	4	4	4	4	4	16	4	4	3	3	4	14	
80	4	4	4	4	4	16	5	5	4	5	5	19	4	4	4	4	4	16	4	4	4	3	4	15	
81	5	5	5	4	5	19	4	4	4	5	4	17	5	5	5	5	5	20	5	4	5	5	5	19	
82	5	5	5	4	5	19	4	4	4	5	4	17	5	5	5	5	5	20	5	4	5	5	5	19	
83	4	3	4	4	4	15	3	3	3	4	3	13	4	4	4	4	4	16	3	4	4	4	4	15	
84	4	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	16	
85	4	4	4	4	4	16	4	4	3	4	4	15	4	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	16	
86	4	4	4	4	4	16	4	4	4	5	4	17	4	4	3	4	4	15	5	5	4	4	5	18	

RESPONDE N	PERNYATAAN																							
	Y						X1						X2						X3					
	Y 1	Y 2	Y3	Y4	RATA - RATA	JUMLA H	X1. 1	X1. 2	X1. 3	X1. 4	RATA - RATA	JUMLA H	X2. 1	X2. 2	X2. 3	X2. 4	RATA - RATA	JUMLA H	X3. 1	X3. 2	X3. 3	X3. 4	RATA - RATA	JUMLA H
87	4	4	5	4	4	17	4	3	3	4	4	14	4	4	4	5	4	17	4	4	4	4	4	16
88	4	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	16
89	2	2	4	3	3	11	4	4	3	5	4	16	3	4	3	3	3	13	4	4	4	5	4	17
90	3	3	3	3	3	12	4	4	4	3	4	15	5	4	4	5	5	18	4	4	3	4	4	15
91	4	3	3	3	3	13	5	4	4	5	3	18	5	4	4	5	5	18	3	4	3	5	4	15
92	3	3	3	4	3	13	5	2	1	4	3	12	2	2	2	5	3	11	4	4	4	5	4	17
93	3	3	3	5	4	14	4	4	3	5	4	16	4	3	3	4	4	14	4	5	4	4	4	17
94	3	2	2	4	3	11	4	3	4	3	4	14	1	1	3	2	2	7	3	3	3	4	3	13
95	2	4	2	5	3	13	4	4	4	3	4	15	4	4	3	4	4	15	5	4	4	4	4	17
96	1	2	4	4	3	11	4	4	4	4	4	16	3	3	3	3	3	12	4	4	4	4	4	16
97	3	4	4	4	4	15	5	4	4	5	5	18	3	3	3	4	3	13	5	5	5	5	5	20
98	3	3	4	3	3	13	4	4	4	3	4	15	3	3	3	3	3	12	4	4	4	4	4	16
99	3	3	3	3	3	12	3	2	2	3	3	10	3	3	3	4	3	13	4	4	4	4	4	16